

TESIS

**ANALISIS *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PENYELENGGARAN FESTIVAL PINISI TAHUN 2019
DI KABUPATEN BULUKUMBA**

*(ANALYSIS OF COLLABORATIVE GOVERNANCE PINISI FESTIVAL 2019
IN BULUKUMBA REGENCY)*

ANDI KALAM ANSHARI SRI WAWO

E012181016



**PROGRAM PASCA SARJANA S-2
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**ANALISIS *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PENYELENGGARAN FESTIVAL PINISI TAHUN 2019
DI KABUPATEN BULUKUMBA**

***(ANALYSIS OF COLLABORATIVE GOVERNANCE PINISI FESTIVAL 2019
IN BULUKUMBA REGENCY)***

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi (S2) Magister Pemerintahan Daerah

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

ANDI KALAM ANSHARI SRI WAWO

E012181016

**PROGRAM PASCA SARJANA S-2
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PENYELENGGARAAN FESTIVAL PINISI TAHUN 2019
DI KABUPATEN BULUKUMBA**

Disusun dan diajukan oleh
ANDI KALAM ANSHARI SRI WAWO
Nomor Pokok E012181016

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal **26 Agustus 2020**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat

Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si.
Ketua

Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si.
Anggota

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan,

Prof. Dr. Hj. Nurlinah M., M.Si.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. H. Armin, M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Kalam Anshari Sri Wawo
Nomor Pokok Mahasiswa : E012181016
Program Studi : (S2) Administrasi Publik
(Konsentrasi Pemerintahan Daerah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut,

Makassar, 02 September 2020
Yang Menyatakan,



Andi Kalam Anshari Sri Wawo

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohim,

Assalamu'alaikum wa Rohmatullahi wa Barokatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas berkat, *ridho, rohmat, taufik, hidayah,* dan *inayah-Nya,* sehingga penulis dapat menyelesaikan serangkaian penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul, “**Analisis Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Festival Pinisi Tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba**”. Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-2 (S2) pada Program Studi Administrasi Publik Konsentrasi Magister Pemerintahan Daerah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Tesis ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk Mengkaji dan menganalisis *Collaborative Governance* pada penyelenggaraan Festival Pinisi yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidaklah mudah. Selama penyusunan tesis ini, penulis menemukan berbagai hambatan dan tantangan, namun hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat tekad yang kuat, semangat yang gigih, dan upaya yang konsisten oleh penulis, juga tentunya dukungan dalam berbagai bentuk dari seluruh pihak yang terkait.

Dalam proses, penelitian ini telah banyak melibatkan berbagai pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada materi yang bisa penulis berikan sebagai tanda ungkapan kesyukuran, terkecuali kekayaan penulis yakni ucapan terima kasih yang tak terhingga dan untaian doa kepada sangkhalik untuk kemurahan-Nya dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku ayahanda **Drs. Andi Muh. Basir Kulle** dan ibunda **Asnarti Said Culla, SH.,MH.,P.hD** yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta memberi banyak nasehat dan dukungan selama penulis menjalankan studi hingga saat ini. Karya kecil ananda persembahkan sebagai tanda bakti dan kasih sayang ananda kepada kalian.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi, semangat dan juga doa dari semua pihak yang telah membantu selama penulis menjalani masa perkuliahan dan penyusunan Tesis ini, kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi pada program Strata-2 (S-2) Universitas Hasanuddin;

2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, beserta seluruh stafnya;
3. Bapak **Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si**, selaku ketua Magister Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin;
4. Ibu **Prof. Dr. Hj. Nurlina, M.Si** selaku ketua Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin;
5. Bapak **Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si** selaku Pembimbing I dan ibu **Dr. Hj. Indar Arifin M.Si** selaku Pembimbing II yang telah senantiasa memberikan arahan dan membimbing penulis sejak awal penyusunan proposal penelitian, hingga proses penyusunan Tesis ini selesai;
6. Para tim penguji Tesis, Ibu **Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si**; Bapak **Dr. Suhardiman Syamsu. M.Si**; dan Bapak **Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si** yang telah memberikan kiritik dan saran yang sangat membangun bagi penulis sebagai upaya dalam penyempurnaan Tesis ini;
7. Seluruh dosen Pascasarjana Magister Pemerintahan daerah yang telah membagi ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, terutama kepada Bapak Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si, bapak Prof Dr. H. A.Gau Kadir, MA; bapak Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si; Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si; bapak Dr. H. Andi. Samsu Alam, M.sj; Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si; bapak Dr.H. M. A. Rusli, M.Si; ibu

Dr. Indar Arifin, M.Si; bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si; bapak Dr.H. Suhardiman Syamsu, M.Si; bapak Dr. Andi. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.

8. Staf pegawai di Program Pasarijana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
9. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan seluruh *stakeholder* yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam proses pengumpulan data, informasi, dan melakukan wawancara sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Saudara-saudari kandung penulis, **Andi Khaerunisa Tenri Waru dan Andi Alamsyah** yang tanpa hentinya mendoakan dan memberikan segala bentuk dukungan untuk penulis dapat meraih kesuksesan;
11. Segenap Keluarga besar Magister Pemerintahan daerah angkatan 2018. Kepada saudara(i); Ita Purmalasari, Sukma Mahardini, Abdul Wahid, Salman, Muh.Zulkarnain, Aksan Mubarak, Fahmi Sulthoni, Rezky Gau, Ahmad Rosandi, A. Nur Pratiwi, Hardianti, Yusriah Amalia,
12. Segenap pimpinan penulis pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ir.Denny Irawan Saardi M.Si selaku Kepala Dinas, Bapak Kemal Redindo Syahrul Putra SH., MH, selaku Sekertaris Dinas, Bapak Zulfikar S.Sos selaku Kasubag Umum

13. Segenap rekan kerja pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Abdi Rasyid, Ahmad, Yuni Permata Sari, Fatimah, dan Puspa yang telah memberi dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
14. Segenap saudara(i) kerabat semasa S1 Amil, Ridwan, Rahmat, Frisca, Vira, Lisa, Puput, Rianti, Ajeng, Ayoesti, Jestin, Dian, Eka, Isma, Riska, Dianti, Wahyu, Rustam, Ari, Fuad, Anca, Ahmad, Fian, Bayu, Dedi, Andhika, Hibatul, dan Gilbi yang senantiasa memberi motivasi dan doa terbaik untuk penulis.
15. Para sahabat Afni Amiruddin, Nadia Indriana Tenriawaru, Adina Zelviana, Alfira Rezki, Andi Ilham Nurhadi, Fadly Ristan Patongai, Andi Rudini yang senantiasa memberikan masukan positif dan doa-doa terbaik kepada penulis .
16. Segenap rekan-rekan HIPMI-PT UNHAS, *Running Connection*, Red Car Community of Indonesia yang senantiasa memberikan supportnya kepada penulis
17. Seluruh kerabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan semua, yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang, doa, dukungan, pelajaran, dan kenangan, tanpa kalian penulis tidak dapat sampai pada titik pencapaian ini.

Pada akhirnya, penulis mengucapkan *syukur* yang sangat tinggi kepada ALLAH SWT. yang telah memberikan jalan bagi penulis untuk dapat mencapai titik ini, semoga Dia-pun berkenan untuk memberikan jalan bagi

penulis untuk dapat meraih kesuksesan sesuai dengan doa dari orangtua, saudara, keluarga, sahabat, dan kerabat penulis. Adapun harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi para pembaca. *Aamiin Yaa Robbal 'Alamin.*

Makassar, Agustus 2020

Penulis

Andi Kalam Anshari Sri Wawo

E012181016

ABSTRAK

ANDI KALAM ANSHARI SRI WAWO. *Analisis Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Festival Pinisi Tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba* (dibimbing oleh Rasyid Thaha dan Indar Arifin).

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Festival Pinisi Tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang akan memberikan gambaran faktual mengenai *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Festival Pinisi Tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *analisis collaborative governance* dalam penyelenggaraan Festival Pinisi Tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba meliputi: (1) proses kolaborasi terdiri atas peran stakeholder yang terlibat di Festival Pinisi Tahun 2019 yaitu: Dinas Pariwisata, PT Yasika Kreasi Utama, PT Surako Abadi Jaya Motor, pihak hotel Same Resort, Bank BPD SULSELBAR, pengusaha kapal dan tokoh adat Bontobahari dan tokoh adat Kajang dan (2) Festival Pinisi tahun 2019 diinisiasi oleh Dinas Pariwisata melalui program kerja berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba No. 21 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 yaitu: Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri dan Keputusan Bupati Bulukumba No. 188. 45 .229.1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Festival Pinisi XII. Adapun, komponen *collaborative governance regime* (CGR) yang digunakan untuk menjawab proses kolaborasi di antaranya: dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, dan dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi.

Kata kunci: *collaborative governance*, stakeholder, penyelenggaraan Festival Pinisi



ABSTRACT

ANDI KALAM ANSHARI SRI WAWO. *The Collaborative Governance Analysis in Festival Pinisi Organization in 2019 at Bulukumba Regency* (supervised by Rasyid Thaha and Indar Arifin).

The research aimed to describe and analyze the *Collaborative Governance* in Pinisi Festival Organization in 2019 at Bulukumba Regency.

This was the qualitative research which would describe the facts concerning the *Collaborative Governance* in the Festival Pinisi Organization in 2019 at Bulukumba Regency.

The research result indicates that the *Collaborative Governance* analysis in Pinisi Festival Organization in 2019 at Bulukumba Regency includes: 1. The collaboration process comprises the role of the stakeholders involved in Pinisi Festival in 2019 namely: Tourism Office, PT. Yasika Kreasi Utama, PT. Surako Abadi Jaya Motor, Same Resort Hotel, Bank BPD SULSELBAR, Shipowners, Bontobahari customary figures and Kajang customary figures. 2. Pinisi Festival is initiated by the Tourism Office through the working program based on the Regulation of Bulukumba Regent Number 21 Year 2018 concerning the Stipulation of the Regional Government Work Plans of Bulukumba Regency, Year 2019 namely: the Promotion Implementation of Archipelago, Domestic and Foreign Tourism and Decree of Bulukumba Regent Number 188. 45 .229. 1 Year 2019 concerning Formation of Steering Committee of Pinisi Festival IIX. Then, the *Collaborative Governance* Regime (CGR) components used to respond the collaboration processes, among others, are: the collaboration dynamics, collaboration actions, temporary impact, and temporary adaptation of the collaboration processes.

Key words: *Collaborative Governance, Stakeholder, Pinisi Festival Organization*



DAFTAR ISI

SAMPUL	<i>i</i>
LEMBAR PENGESAHAN	<i>ii</i>
LEMBAR KEASLIAN TESIS	<i>iii</i>
KATA PENGANTAR	<i>iv</i>
ABSTRAK	<i>x</i>
<i>ABSTRACT</i>	<i>xi</i>
DAFTAR ISI	<i>xii</i>
DAFTAR TABEL	<i>xv</i>
DAFTAR MATRIX	<i>xvi</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>xvii</i>
DAFTAR LAMPIRAN	<i>xviii</i>
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep kolaborasi (<i>Collaborative Governance</i>)	12
2.1.1. Proses Kolaborasi	15
2.1.2. Tindakan- tindakan dalam Kolaborasi	29
2.1.3. Dampak dan adaptasi hasil tindakan dinamik Kolaborasi	30

2.2. Konsep Pariwisata	31
2.2.1. Pariwisata Budaya	38
2.2.2. Pariwisata Alam	40
2.3. Penelitian Terdahulu	42
2.4. Kerangka Pikir Penelitian	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
3.2. Lokasi Penelitian	48
3.3. Fokus Penelitian	49
3.4. Sumber Data	50
3.5. Teknik Penentuan Informan	50
3.6. Informan	51
3.7. Teknik Pengumpulan Data	52
3.8. Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba	55
4.1.1. Kondisi Geografis	55
4.1.2. Visi Misi Kabupaten Bulukumba	57
4.2. Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba	59
4.2.1. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba	60
4.2.2. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba	62

4.3. Proses kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan <i>Stakeholder</i> dalam Penyelenggaraan Festival Pinisi Tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba	63
4.3.1. Dinamika Kolaborasi	64
4.3.2. Tindakan Kolaborasi	91
4.3.3. Dampak dan adaptasi hasil tindakan kolaborasi	108
4.4. Matriks <i>Collaborative Governance</i>	123
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	125
5.2. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	43
Tabel 2. <i>Stakeholder</i> yang terlibat dalam penyelenggaraan Festival Pinisi	66
Tabel 3. Bentuk administratif yang dilakukan Pemerintah kepada <i>stakeholder</i> yang terlibat	93
Tabel 4. Jumlah Wisatawan dan Perputaran Ekonomi	113

DAFTAR MATRIKS

Matriks 1. Tindakan- tindakan Kerjasama	107
Matriks 2. <i>Collaborative Governance</i> dalam penyelenggaraan Festival Pinisi Tahun 2019	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir	47
Gambar 2. Bagan Alur Kolaborasi	66

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Kabupaten Bulukumba	131
Lampiran 2. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata	131
Lampiran 3 Undangan rapat kepada bank bpd sulselbar	132
Lampiran 4. Undangan rapat kepada general manager same hotel	133
Lampiran 5. Undangan rapat kepada pengusaha kapal pinisi	134
Lampiran 6. Udangan rapat kepada pt suraco jaya abadi motor	135
Lampiran 7. Rapat Persiapan Penyelenggaraan Festival Pinisi	136
Lampiran 8. Rapat Pertemuan Pemda Bulukumba Bersama Pihak Bank BPD Terkait Penyelenggaraan Festival Pinisi	136
Lampiran 9. Pertemuan Sekertaris Dinas Pariwisata Bulukumba bersama tokoh adat Kajang	137
Lampiran 10. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188..45-229.1	138
Lampiran 11. PAD 5 Tahun terakhir (Dinas Pariwisata Bulukumba)	149
Lampiran 12. Dokumen Kontrak PT Yasika Kreasi Utama	150
Lampiran 13. Surat Permohonan Sponsorship	152
Lampiran 14. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	153
Lampiran 15. Berita acara Ibah Kapal Pinisi	154

Lampiran 16. Bentuk Apresiasi MURI	157
Lampiran 17. Proses Penyelenggaraan Pakaian Hitam	157
Lampiran 18. Proses Pemberian Kapal Pinisi	158
Lampiran 19. Bukti Transfer PT Suraco Jaya Abadi	158
Lampiran 20. Bukti Transfer Bank BPD SULSELBAR	159
Lampiran 21. Surat Permohonan Bantuan Kepada Same Hotel	159
Lampiran 22. Ritual <i>Andingingi</i>	160
Lampiran 23. Barasanji pada proses ritual anyyorong lopi	160
Lampiran 24. Ritual <i>Anyyorong Lopi</i>	161
Lampiran 25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	162
Lampiran 26. Data Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	164
Lampiran 27. PKL Yang Menjual Baju Pantai Bira	165
Lampiran 28. Baju Kaos Pasang <i>Ri Kajang</i>	165
Lampiran 29. Tata Tertib Kawasan Adat Ammatoa	166

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep *Collaborative Governance* sebagai sebuah basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi program Pemerintah. *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai *stakeholder*. Dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi, dan aktivitas antara pihak, mereka masing-masing tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas untuk mengambil organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama.

Collaborative Governance pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak yang terkait. Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan *stakeholder* maupun masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kerjasama diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Dalam perumusan

tujuan, visi misi norma dan nilai bersama dalam kerjasama, kedudukan masing-masing pihak bersifat setara yakni memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen walaupun terikat pada kesepakatan bersama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* merupakan kerja sama antar *stakeholder* atas dasar prinsip bersama untuk mencapai tujuan tertentu termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata yang juga merupakan tugas dari pemerintah. .

Pariwisata merupakan sesuatu yang penting bagi berbagai Negara di dunia karena pariwisata dianggap dapat berkontribusi pada perkembangan suatu negara. Pitana mengatakan bahwa:

“Pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia dan merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara, sektor pariwisata dinilai penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara, pariwisata sering disebut sebagai *passport to development, new kind of sugar, tool regional development, invisible export, non-polluting industry* dan sebagainya”¹.

Artinya, apabila ditinjau dalam perspektif ekonomi, pariwisata merupakan suatu sektor yang mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara.

¹Pitana I.G dan Gayatri. *Sosiologi Pariwisata Yogyakarta*. C.V Andi. 2005.Hlm 3

Secara garis besar peranan pariwisata terletak pada tiga segi yakni segi ekonomi (devisa, pajak-pajak), segi kerjasama antar negara dan segi kebudayaan (media promosi kebudayaan terhadap wisatawan). Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di Asia Tenggara yang dikenal dengan kekayaan alam dan keanekaragaman budayanya, hal tersebut dapat menjadi sebuah aset penting Bangsa Indonesia dalam pengembangan pariwisata, di mana pariwisata sebagai media pelestari kebudayaan, sekaligus dapat mempromosikan kebudayaan yang di miliki Bangsa Indonesia.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang kaya dengan objek wisata. Berbagai objek wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan di Kabuptaen Bulukumba diantara lain objek wisata kerajinan, wisata alam, wisata sejarah/situs sejarah dan budaya, serta wisata agro. Objek wisata yang menjadi andalan utama Kabupeten Bulukumba adalah pantai Bira. Pantai Bira terletak di Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari berjarak 42 km dari Kota Bulukumba.

Kabupaten Bulukumba dijuluki sebagai "*Butta Panrita Lopi*" yang artinya tempat bermukimnya ahli pembuat perahu. Pusat pembuatan perahu Pinisi terletak di Kecamatan Bonto Bahari tepatnya di kelurahan Tanah Beru, Desa Ara dan Bira yang berjarak 24 km dari Kota Bulukumba. Inilah salah satu objek wisata kerajinan sekaligus menjadi objek wisata budaya di Kabupaten Bulukumba. Julukan *Butta Panrita Lopi* bagi

masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba merupakan kebanggaan tersendiri oleh karena "*kepanritaannya*" membuat perahu khususnya Pinisi telah membawa nama Bulukumba ke tingkat nasional bahkan internasional.

Dinas Pariwisata sebagai OPD yang memiliki tugas dan fungsi untuk mempromosikan dan mengembangkan potensi pariwisata mengadakan sebuah pagelaran dengan menyelenggarakan festival budaya yang bertajuk Festival Pinisi. Penamaan Pinisi dalam festival ini karena Pinisi merupakan ikon Kabupaten Bulukumba dan salah satu upaya pemerintah untuk memperkenalkan bahwa Pinisi merupakan warisan budaya dari Kabupaten Bulukumba. Dalam mempromosikan dan mengembangkan potensi pariwisata selain membutuhkan merek sebagai identitas dari daerah tersebut, juga memerlukan suatu daya tarik dan objek wisata sebagai tujuan dari wisatawan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Festival Pinisi tersebut memadukan antara wisata budaya dan wisata alam.

Event Festival Pinisi untuk pertama kalinya diadakan pada tahun 2010 dan diselenggarakan setiap tahun sebagai ajang promosi wisata. Lokasi pelaksanaan Festival Pinisi terdiri dari beberapa tempat yakni Pantai Bira, pantai samboang, Bonto Bahari (lokasi pembuat kapal Pinisi), kawasan adat ammatoa Kajang dan di lapangan pemuda. Ada berbagai rangkaian acara dalam penyelenggaraan Festival Pinisi diantaranya menampilkan tari-tarian tradisional, lomba membuat miniatur kapal Pinisi,

lomba fotografi objek wisata, ritual *andingingi* di Kajang, dan *annyorong lopi* (mendorong kapal Pinisi) serta di tahun 2019 terdapat sebuah rangkaian acara baru yaitu karnaval pakaian hitam.

Di tahun 2019 Festival Pinisi berhasil tercatat dalam rekor MURI dimana karnaval busana hitam sebagai salah satu rangkaian Festival Pinisi menghadirkan sebanyak kurang lebih 27.000 orang berbusana hitam yang diakui oleh MURI sebagai karnaval busana hitam terbesar di Indonesia. Pakaian berwarna hitam tersebut merupakan warna khas dari suku Kajang yang ada di Kabupaten Bulukumba. Festival Pinisi juga berhasil mempertahankan sebanyak tiga kali berturut turut tercatat dalam *Calender of Event Wonderful* Indonesia di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI sebagai *event* Nasional. Di Tahun 2019 salah satu pengusaha kapal Pinisi bernama Syafruddin mengibahkan kapalnya untuk pemerintah Kabupaten Bulukumba demi memajukan sektor pariwisata. Pengusaha tersebut pada tahun 2017 telah terlibat dalam pelaksanaan Festival Pinisi dengan menyewakan kapal pinisi miliknya untuk digunakan pada saat ritual *annyorong lopi* (menurunkan kapal) yang merupakan salah satu rangkaian acara dalam Festival Pinisi.

Pantai Bira merupakan salah satu lokasi pelaksanaan Festival Pinisi, berdasarkan data jumlah wisatawan yang tercatat pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015 sebanyak 160.559 wisatawan, selanjutnya ditahun 2016 sebanyak 161.731 wisatawan, berikutnya ditahun

2017 sebanyak 189.181 wisatawan dan tahun 2018 sebanyak 242.367 wisatawan, serta pada tahun 2019 sebanyak 261.034 wisatawan. Sementara data khusus wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bulukumba untuk menghadiri Festival Pinisi yang tercatat pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba terkait data jumlah wisatawan dan jumlah perputaran ekonomi selama pelaksanaan Festival Pinisi tahun 2019 yaitu sebanyak 66.881 orang wisatawan yang berkunjung sementara perputaran ekonomi di Kabupaten Bulukumba berkisar Rp. 9.248.430.000.

Wisatawan memberikan efek positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, PAD Kab.Bulukumba yang bersumber dari sektor pariwisata lebih baik dari tahun sebelumnya. Dimana realisasi pada tahun 2015 sebesar 1.720.362.000, pada tahun 2016 sebesar 2.529.111.000, pada tahun 2017 sebesar 3.058.970, pada tahun 2018 sebesar 3.075.895.000, dan pada tahun 2019 sebesar 3.275.065.000. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan kepariwisataan termasuk Festival Pinisi memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian di Kabupaten Bulukumba.

Wisata budaya dapat menjadi faktor pendongkrak untuk menarik wisatawan karena wisatawan akan tertarik untuk menyaksikan apa yang mereka tidak miliki di daerah masing-masing dan untuk wisatawan lokal dapat menambah pengetahuan tentang apa-apa saja kekayaan budaya

yang dimiliki Kabupaten Bulukumba. Potensi wisata alam yang indah juga menjadi faktor pendukung dari kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Bulukumba.

Langkah Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang mengemas objek wisata budaya dan alam dalam sebuah rangkaian *event* yang bertajuk Festival Pinisi merupakan sebuah langkah dalam mengembangkan potensi wisata budaya yang ada di Kabupaten Bulukumba, dan juga sebagai strategi untuk menarik wisatawan agar menjadi nilai jual tinggi pada sektor pariwisata, selain itu sebagai langkah yang ditempuh untuk melestarikan budaya agar pariwisata Kabupaten Bulukumba semakin terdepan dalam kancah percaturan pariwisata.

Pemerintah Daerah melihat potensi-potensi budaya yang dimiliki Kabupaten Bulukumba menjadi sesuatu hal yang penting untuk dikembangkan pada sektor pariwisata mengacu pada prinsip dasar pariwisata bahwa pengembangan pariwisata bukan hanya konfigurasi bentangan alam tetapi juga keragaman budaya. Dalam pelaksanaan Festival Pinisi ada tiga *stakeholder* yang memegang peranan penting yakni pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, pihak swasta dalam hal ini PT Yasika Kreasi Utama, Bank BPD SULSELBAR, PT. Suraco Jaya Abadi Motor, Same Hotel, Syafruddin selaku pengusaha kapal, dan masyarakat dalam hal ini para tokoh adat Bonto Bahari dan tokoh adat Kajang.

Proses kolaborasi antar *stakeholder* diawali dengan adanya pertemuan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat yang membahas mengenai persiapan pelaksanaan Festival Pinisi dan mengungkapkan hal-hal yang menjadi hambatan pemerintah dalam proses pelaksanaan kegiatan. Setiap *stakeholder* memberikan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Festival Pinisi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing seperti pihak PT. Yasika Kreasi Utama yang bertindak sebagai *event organizer*, pihak Bank BPD SULSELBAR dan PT Suraco Jaya Abadi Motor yang memberikan bantuan dana. Ketiga aktor tersebut merupakan pihak yang memberi dukungan dan sumbangsi positif terhadap kegiatan Festival Pinisi.

Tindakan yang dilakukan aktor yang lainnya seperti Syafruddin selaku pengusaha kapal yang mengibahkan kapal pinisi kepada pemerintah, tokoh adat Bonto Bahari dan tokoh adat Kajang yang menampilkan atraksi budaya pada rangkaian festival Pinisi merupakan tindakan kolaborasi yang mendukung kesuksesan Festival Pinisi. Tindakan dari masing-masing *stakeholder* memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata baik itu terhadap festival pinisi itu sendiri, peningkatan jumlah wisatawan dan perekonomian hal tersebut membuat kerja sama dan kolaborasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat akan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan Festival Pinisi berikutnya.

Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan antar *stakeholder* yang saling bekerja sama dan berkolaborasi tentu memberikan dampak yang tidak diinginkan seperti adanya hal-hal yang cenderung tidak menguntungkan salah satu *stakholder* dalam berkolaborasi. Kolaborasi pihak pemerintah dan tokoh masyarakat adat Kajang pada penyelenggaraan Festival Pinisi memberikan dampak negatif, dimana terjadi pelanggaran tata tertib yang diyakini masyarakat adat Kajang yang dilakukan oleh wisatawan. Pelanggaran tata tertib tersebut diakibatkan karena tidak tegasnya pemerintah dalam memberikan edukasi kepada wisata terkait larangan mengambil gambar pada Kawasan adat Kajang.

Proses kolaborasi dalam penyelenggaraan Festival Pinisi juga melahirkan suatu dampak yang tidak terduga oleh pihak penyelenggara seperti meningkatnya penjualan baju hitam di Kabupaten Bulukumba menjelang pelaksanaan karnaval pakaian hitam yang merupakan rangkaian acara festival Pinisi. Pada setiap dampak tersebut masing-masing *stakeholder* memiliki cara untuk beradaptasi agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan tujuan.

Penyelenggaraan Festival Pinisi sebagai *event* promosi wisata membutuhkan keterlibatan antar *stakeholder* baik itu pihak pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga *event* tersebut agar dapat berjalan sesuai tujuan yang telah disepakati bersama. Berdasarkan uraian yang dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Colaborative**

Governance dalam penyelenggaraan Festival Pinisi Tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti berusaha untuk mengemukakan permasalahan agar keseluruhan proses penelitian dapat terarah pada pokok masalah yang sebenarnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis proses kolaborasi dalam penyelenggaraan festival Pinisi tahun 2019 yang telah dijabarkan sehingga muncul pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Dinamika Kolaborasi antar Pemerintah dengan pihak-pihak yang berkolaborasi?
2. Bagaimana Tindakan-Tindakan Kolaborasi?
3. Bagaimana Dampak Sementara dan Proses adaptif dari Kolaborasi Tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari judul “Analisis *Collaborative Governance* Dalam Penyelenggaraann Festival Pinisi Tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba”, yaitu Untuk mengkaji dan menganalisis proses *Colaborative Governance* dalam penyelenggaraan Festival Pinisi Tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba.

1.4. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian sebagaimana dirumuskan diatas maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis, Secara umum temuan penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian tentang bentuk dari kolaborasi pemerintah dalam sebagai masukan terutama dalam pengembangan Festival Pinisi di Kabupaten Bulukumba.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai wahana untuk mengkaji secara ilmiah gejala-gejala yang ada dalam dunia nyata berdasarkan teori-teori yang pernah diperoleh. Adapun temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi calon peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dan juga mengembangkannya dibidang lainnya
3. Manfaat metodeologis, Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan masukan atau rekomendasi yang kemudian memberikan manfaat bagi pihak berkepentingan atau Pemerintah Daerah sebagai masukan terutama dalam pengembangan Festival Pinisi kedalam suatu bentuk pengembangan dan perkonomian yang lebih manusiawi, berbudaya dan berhasil guna.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kolaborasi Pemerintah (*Collaborative Governance*)

Salah satu bentuk dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan atau *Governance* yakni konsep *Collaborative Governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan.²

Menurut Ansell dan Gash mendefinisikan *Collaborative Governance* adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi

² Purwanti, Nurul D, *Collaborative Governance* (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer), (Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM, 2016) hlm.174

konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.³

Definisi tersebut dapat dirumuskan beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik, pertama forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik, kedua, peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik, ketiga, peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik, keempat, forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama, kelima, Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus, keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.⁴

Collaborative Governance merupakan instrumen yang tepat untuk berkonfrontasi dengan masalah, sebab *Collaborative Governance* menciptakan “kepemilikan bersama” terhadap masalah tersebut. Berbagai aktor memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Bukan hal yang mudah untuk menciptakan suatu kepehaman di antara peran aktor tersebut. *Collaborative Governance* berperan sebagai

³ Ansell dan Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, (Journal of Public Administration Research and Theory. Oxford University Press, 2007) hlm 544

⁴ Ibid. hlm 544

penengah agar para aktor dapat merumuskan kesepakatan yang sama terhadap suatu masalah. *Collaborative Governance* merupakan suatu forum yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.⁵ Balogh mengemukakan bahwa :

“*Collaborative Governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja”.⁶

Sementara definisi *Collaborative Governance* menurut Robertson dan Choi (2010) (dalam Kumorotomo) :

“*Collaborative Governance* adalah proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan setiap *stakeholder* memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut “.⁷

Collaborative Governance juga dapat menggambarkan keadaan saling ketergantungan antar aktor. Keinginan melakukan *Collaborative Governance* muncul karena para aktor menyadari adanya keterbatasan yang mereka miliki. Kemudian, aktor tersebut perlu menyatakan keinginan

⁵Afni A.2019. *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pedagang Kaki Lima Kanre Rong Karebosi di Kota Makassar*. Jurnal

⁶ Balogh, Stephen, dkk. An Integrative Framework for Collaborative Governance, *Journal of Public Administration Research and Theory*. 2011, hlm.2

⁷ Kumorotomo, Wahyudi, dkk. Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi Tentang Collaborative Governance di Sektor Publik. Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM, 2013.hlm.10

dan kesedian mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan aktor lain. Tiap aktor yang terlibat perlu mengakui legitimasi yang dimiliki oleh aktor lain. Setelah para aktor berkomitmen untuk berkolaborasi, maka perlu dibangun rasa kepemilikan bersama kepada terhadap setiap proses kolaborasi.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik melibatkan berbagai aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai latar belakang, baik dalam tataran pemerintahan, swasta dan masyarakat sipil (*government, private sector, civil society*) dalam rangka mencapai tujuan publik. Oleh sebab itu, di dalam kolaborasi interaksi yang muncul bersifat egaliter yaitu seluruh aktor mempunyai kedudukan yang sama dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

2.1.1. Proses Kolaborasi

Proses dari suatu kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakan karena karakter- karakter dari tiap lembaga atau organisasi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dijelaskan bahwa teori proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus, dengan menghasilkan tindakan- tindakan dan dampak

sementara, sebelum mengarah pada dampak utama serta adaptasi terhadap dampak sementara.⁸

Proses kolaborasi di atas yang dimaksud berada dalam kotak CGR. Penelitian ini menggunakan berbagai komponen dalam CGR untuk mengungkap fenomena kolaborasi. Berbagai komponen yang menjadi proses kolaborasi diantaranya adalah 1) dinamika kolaborasi, 2) tindakan kolaborasi dan 3) Dampak sementara dan adaptasi hasil tindakan pada dinamika kolaborasi.

2.1.1.1. Dinamika Kolaborasi

Beberapa ilmuwan menggambarkan proses kolaborasi sebagai sebuah tahapan linier yang terjadi dari waktu ke waktu dimulai dari pendefinisian masalah menuju setting agenda hingga implementasi. Emerson dalam teori CGR melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang oriteratif. Emerson fokus pada tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi. Komponen tersebut antara lain: Penggerakan prinsip bersama (*Principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*) dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*).

⁸ Emerson, Kirk., Tina Nabatchi & Stephen Balogh. *Integrative Frame Work for Collaborative Governance*. (Journal of Administration Research and Theory, Vol. 22. 2012)

2.1.1.1.1 Penggerakan prinsip bersama

Merupakan hal yang terjadi terus-menerus dalam kolaborasi, beberapa hal seperti dialog tatap- muka, atau melalui perantara teknologi adalah cara untuk menggerakkan prinsip bersama. Di dalam komponen ini terdapat penegasan kembali tujuan bersama, pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip bersama, yang sering diungkap dalam berbagai perspektif aktor yang terlibat. Oleh karena itu, penyatuan prinsip merupakan inti dari hal ini.⁹ Karakteristik masing-masing aktor, merupakan elemen kunci yang mempengaruhi seberapa baik prinsip bersama berjalan. Langkah awal kritis adalah bagaimana pemerintah memilih aktor yang akan terlibat dalam kolaborasi. Selanjutnya, setelah kolaborasi berkembang, penambahan aktor pun dimungkinkan. Kemudian barulah kegiatan penggerakan prinsip bersama terwujud, yang dapat dijelaskan dalam tiga elemen berikut:

1) Pengungkapan (*discovery*).

Mengungkap kepentingan masing-masing aktor, nilai-nilai aktor, serta upaya konstruksi kepentingan bersama. Pengungkapan baik pada aktor kolaborasi, dan individu di dalamnya, dapat dianalisis dari kepentingan aktor tersebut bergabung di dalam kolaborasi. Analisis

⁹ *Ibid* Hal.10

kemudian melihat dari seberapa besar dampak dan implikasi yang ditimbulkan, yaitu apakah terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan sehingga mempengaruhi proses berkolaborasi.

Namun, Emerson, Nabatchi, & Balogh menekankan pengungkapan pada level individu dan actor utamanya guna membangun pembentukan “*shared-meaning*” atau pengertian bersama secara terus-menerus. Terbentuknya hal ini akan mempengaruhi proses diskusi bersama yang di dalamnya terdapat deliberasi sebagai “*hall-mark of successful engagement*” atau tanda utama dari suksunya pergerakan bersama.

2) Deliberasi (*deliberation*).

Penekanan tidak hanya pada terbentuknya deliberasi, namun lebih kepada bagaimana kualitas deliberasi karena kolaborasi seringkali terjadi perbedaan pemikiran, perspektif, dan kepentingan yang muncul setiap saat. Membangun deliberasi yang berkualitas memerlukan keahlian advokasi tidak harus pada semua individu namun sebagian saja sudah mencukupi. Advokasi ini bersifat internal artinya untuk mengarahkan kolaborasi, serta aktor agar tetap berjalan pada tujuan kolaborasi, menghasilkan resolusi konflik secara strategis dan efektif.

Beberapa hal analisis deliberasi di atas, secara implisit berusaha untuk mendapat jawaban mengenai keberanian para aktor untuk bertindak

leluasa dalam kolaborasi, ada atau tidaknya tekanan dari pihak pemerintah sehingga membatasi tindakan kolaborasi, atau ada paksaan harus berbuat demikian. Adanya proses demokrasi delibratif, sehingga mampu membuat kolaborasi menjadi wadah untuk mengembangkan inovasi dan kreasi, baik dalam memunculkan ide, maupun dalam menghadapi praktek kegiatan kolaborasi di lapangan, yaitu apabila ditemukan permasalahan tak terduga, maka setiap aktor tidak takut akan bertindak kreatif, karena tidak ada tekanan untuk harus bertindak sesuai yang diperintahkan.

3) Determinasi (*determinations*).

Merupakan serangkaian determinasi yaitu tindakan penetapan akan maksud tujuan yang diinginkan yang kemudian dibedakan menjadi primer dan substantif.

- a) Determinasi primer: beberapa keputusan prosedural (misalnya: agenda setting kolaborasi, menjadwalkan diskusi, membentuk kelompok kerja).
- b) Determinasi substantif: hasil produk kolaborasi (misalnya: pencapaian kesepakatan bersama, rekomendasi final tindakan kolaborasi).

Dalam kolaborasi yang sedang berlangsung lebih banyak determinasi substantif yang dibuat secara terus-menerus karena sifatnya lebih dibutuhkan. Sedangkan melihat dari praktisnya, determinasi dapat

diwujudkan melalui pembentukan konsensus sebagai metode fundamental dalam pembentukan determinasi bersama. Kesimpulannya bahwa penggerakan prinsip bersama dibentuk dan dipertahankan keberadaannya oleh proses interaktif dari pengungkapan, deliberasi, dan determinasi. Efektivitas penggerakan prinsip bersama ditentukan oleh kualitas masing-masing dan proses interaktif dari tiga hal tersebut.

2.1.1.1.2 Motivasi bersama (*shared motivation*)

Motivasi bersama hampir sama dengan dimensi proses kolaborasi yang diungkapkan oleh Ansell dan Gash kecuali legitimasi. Motivasi bersama menekankan pada elemen interpersonal dan relasional dari dinamika kolaborasi yang kadang disebut sebagai modal sosial. Komponen ini diinisiasi oleh penggerakan prinsip bersama yang merupakan hasil jangka menengah. Namun menurut Huxham dan Vangen dalam Emerson, Nabatchi & Balogh, motivasi bersama juga memperkuat dan meningkatkan proses penggerakan prinsip bersama. Emerson, Nabatchi, & Balogh mengartikan motivasi bersama sebagai siklus penguatan diri yang terdiri dari empat elemen saling menguntungkan diantaranya: kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen.¹⁰

1) Kepercayaan bersama (*mutual trust*).

¹⁰ *Ibid* Hal.13

Unsur pertama dari motivasi bersama adalah kepercayaan bersama. Menurut Fisher dan Brown dalam Emerson, Nabatchi & Balogh kepercayaan bersama akan berkembang seiring dengan keterlibatan pihak-pihak pada saat melakukan kolaborasi, mengenal satu sama lain dan saling membuktikan bahwa diri mereka dapat dipercaya, bertanggung jawab dan dapat diandalkan.

Kepercayaan merupakan bagian penting dan mutlak dalam kemajuan kolaborasi. Sebagai contoh dalam sebuah kerjasama, kepercayaan sangat berperan penting dalam mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan nilai investasi dan menjaga stabilitas dalam hubungan serta merangsang pembelajaran bersama, pertukaran pengetahuan dan inovasi. Dalam hal ini kepercayaan dikonseptualisasikan sebagai mekanisme yang akan menghasilkan rasa saling mengerti antar *stakeholder* yang pada akhirnya akan melahirkan legitimasi bersama dan bermuara pada adanya komitmen bersama. Kepercayaan memungkinkan individu atau kelompok untuk mengesampingkan urusan individu atau kelompok mereka demi memahami kepentingan, kebutuhan, nilai dan tujuan bersama.

2) Pemahaman bersama (*mutual understanding*).

Pemahaman bersama melahirkan kepercayaan yang dapat membuat *stakeholder* mengapresiasi perbedaan yang ada dari *stakeholder*

lain. “Mutual understanding” tidak sama dengan kata “shared understanding” yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash. Shared understanding adalah kondisi dimana semua *stakeholder* menyetujui tujuan-tujuan dan nilai- nilai yang telah disepakati bersama. Sedangkan, mutual understanding lebih ke arah pemahaman bersama yang dimaksud untuk membuat sesama *stakeholder* saling mengerti dan menghargai posisi dan kepentingan *stakeholder* lain bahkan ketika *stakeholder* tersebut tidak sependapat.

Pemahaman bersama menuju pada kualitas interaksi interpersonal individu dan organisasi. Pembentukan pemahaman bersama sering dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk di dalam proses kolaborasi.

3) Legitimasi internal (*internal legitimitation*).

Legitimasi internal merupakan pengakuan yang berasal dari internal kolaborasi. Dalam hal ini actor- aktor dalam berkolaborasi dituntut untuk dapat dipercaya, dan kredibel terhadap kepentingan bersama. Aktor-aktor kolaborasi harus menyadari bahwa ada rasa ketergantungan antar aktor yang akan menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan. Legitimasi internal, pemahaman bersama, dan kepercayaan bersama merupakan tiga elemen yang saling terkait erat satu sama lain dalam komponen motivasi bersama,

sehingga untuk elemen selanjutnya, yaitu komitmen juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kualitas tiga elemen ini.

4) Komitmen (*commitment*).

Adanya komitmen pada proses kolaborasi mampu menghilangkan penghambat yang seringkali muncul karena perbedaan karakteristik dan kepentingan antar aktor. Komitmen membuat para aktor berinteraksi lintas organisasi sehingga terbentuk komitmen bersama. Analisis kualitas pembentukan komitmen pada setiap aktor kolaborasi, dapat melihat dari tujuan bergabung di dalam kolaborasi, yaitu apakah ada kepentingan bersama yang telah bertemu, sehingga mempengaruhi keaktifkan daripada aktor tersebut untuk berpartisipasi di dalam kolaborasi. Selain itu, adanya sikap optimis akan tercapainya tujuan kolaborasi, dan semangat untuk melakukan kegiatan kolaborasi dengan aktor lain juga membentuk komitmen. Adanya hasil baik sementara dari kolaborasi atau "*small-wins*" dan insentif yang baik juga seringkali mempengaruhi perubahan komitmen aktor kolaborasi.

Kesimpulannya, adanya interaksi yang berkualitas membentuk kepercayaan bersama dan pengertian bersama, sehingga tercipta pengakuan legitimasi internal, yang mempengaruhi komitmen bersama. Keempat hal tersebut berkembang dan saling mempengaruhi, sehingga menciptakan motivasi bersama tetap berlangsung.

2.1.1.1.3 Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*)

Tujuan kolaborasi adalah untuk menghasilkan *outcome* yang diinginkan bersama yang tidak dapat dicapai secara individu atau oleh satu aktor saja. Hal ini dikarenakan kolaborasi melibatkan aktivitas kooperatif untuk meningkatkan kapasitas diri dan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, teori CGR harus menghasilkan kapasitas baru bagi masing-masing aktor untuk bertindak bersama yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Seringkali beberapa aktor kolaborasi tidak punya kapasitas untuk bertindak bersama, karena adanya perbedaan dan ketimpangan kekuatan. Oleh karena itu, definisi dari kapasitas adalah “*a collection of cross-functional elements that come together to create the potential for taking effective action*” atau berbagai hasil dari elemen-elemen lintas fungsional untuk menghasilkan tindakan yang efektif, karena adanya kapasitas yang memadai dari aktor. Dalam hal ini, kapasitas untuk melakukan tindakan bersama dalam kerangka yang merupakan kombinasi dari empat elemen penting diantaranya : prosedur dan kesepakatan institusi, kepemimpinan, pengetahuan dan sumber daya. Elemen-elemen tersebut harus memadai dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama seringkali dipandang sebagai hasil dari interaksi pergerakan prinsip bersama dan motivasi

bersama. Namun perkembangan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama juga dapat memperkuat motivasi bersama dan penggerakan prinsip bersama yang memastikan tindakan dan dampak kolaborasi yang lebih efektif. Selanjutnya, elemen-elemen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Prosedur dan kesepakatan insitusi (*procedural and insitutional arrangements*)

Berbagai prosedur dan protokol serta struktur kolaborasi dibutuhkan dalam manajemen interaksi antar aktor. Sedangkan dimensi-dimensi dari kesepakatan bersama adalah aturan-aturan umum (*ground rules*), protokol-protokol dalam kegiatan (*operating protocol*), peraturan untuk membuat keputusan (*decision rules*), dan sebagainya yang mungkin dapat terbentuk. Seringkali kesepakatan yang ada dalam kolaborasi awalnya adalah informal, namun seiring berjalannya waktu, maka dibutuhkan formalitas, seperti adanya pembentukan perundangan atau legalformal yang menjadi payung hukum berkolaborasi. Untuk kolaborasi yang lebih besar dan lebih kompleks serta berdurasi panjang maka stuktur insitusi kolaborasi harus jelas dan protokol-protokol untuk administrasi serta manajemen kegiatan kolaborasi diperlukan. Sedangkan kesepakatan institusi (*institutional arrangements*) terdapat pada intra-organisasi (bagaimana aktor melakukan

governing dan manajemen organisasinya sendiri dalam inisiatif berkolaborasi), serta inter-organisasi (bagaimana grup kolaborasi manajemen proses, serta bagaimana kolaborasi berintegrasi dengan pembuat keputusan dari pihak luar).

Struktur kolaborasi yang baik adalah fleksibel dan tidak hirarki. Struktur bersifat jejaring dengan variasi yang berbeda, biasanya pilihan umum yang digunakan adalah “*self-managing system*” dengan kepemimpinan dari aktor pemerintah atau membuat struktur yang benar-benar baru. Walaupun kolaborasi berbentuk fleksibel dan tidak hirarki, namun peraturan masih merupakan hal penting yang dibutuhkan.

2) Kepemimpinan (*leadership*)

Kepemimpinan memegang peranan penting yang mutlak dalam kolaborasi. Berbagai peran pemimpin selama proses kolaborasi antara lain, (1) sebagai pihak yang menggali dukungan untuk kolaborasi, (2) penginisiasi pertemuan, (3) fasilitator dan mediator, (4) representasi dari aktor, dan kolaborasi secara keseluruhan, (5) pendistributor pengetahuan, (6) mendorong penggunaan teknologi dalam kolaborasi, serta (7) melakukan advokasi pada publik. Peran pemimpin lain yang utama adalah bagaimana tindakannya saat mendorong deliberasi atau mengatasi konflik, dan bagaimana meningkatkan determinasi para aktor terhadap tujuan kolaborasi (dilakukan selama proses kolaborasi berlangsung). Seringkali

pemimpin kolaborasi tidak mampu menjalankan perannya dengan baik, karena ketidaktahuan akan *skills* atau kemampuan yang harus mereka kuasai atau bahkan mereka tidak mengetahui bahwa kepemimpinan yang dibutuhkan dalam kolaborasi berbeda dengan kepemimpinan pada organisasi secara umum.

3) Pengetahuan (*knowledge*)

Menurut Groff & Jones dalam Emerson, Nabatchi, & Balogh, menjelaskan pengetahuan sebagai: “*Knowledge is information combined with understanding and capability: it lives in the minds of people...Knowledge guides action, whereas information and data can merely inform or confuse*”. Pengetahuan adalah kombinasi dari informasi dengan memahami informasi itu dan menambah kapabilitas. Pengetahuan membawa pada tindakan, namun pengetahuan juga dapat menginformasi atau membingungkan.¹¹ Yang lebih penting adalah bagaimana mendistribusikan pengetahuan dan para aktor untuk memanfaatkannya sehingga berguna bagi proses kolaborasi.

4) Sumber daya (*resources*)

Adanya pertukaran maupun penggabungan sumber daya merupakan salah satu keuntungan kolaborasi. Sumber daya adalah

¹¹ *Ibid.* Hal. 16

pendanaan finansial, pembagian waktu dan peran, dukungan teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan, saling melakukan pendampingan, kebutuhan keahlian analisis kolaborasi, dan implementor di lapangan, serta kebutuhan ahli. Dalam kolaborasi selalu terjadi perbedaan besar sumber daya antar aktor (*resource disparities*). Pengukuran efektivitas sumber daya dilihat dari bagaimana kemampuan unsur-unsur kolaborasi (pemimpin, aktor, dan individu) melakukan manajemen sumber daya berdasarkan perbedaan tersebut. Dalam prakteknya sangat rumit dan tidak mudah, karena dipengaruhi oleh elemen lain, yaitu adanya prosedur dan kesepakatan institusi yang dibuat apakah memwadahi hal tersebut. Selanjutnya bagaimana peran pemimpin dan distribusi pengetahuan yang ada mendorong pertukaran sumber daya dan apakah kolaborasi membentuk mekanisme manajemen sumber daya tersebut.

Pada dasarnya kapasitas untuk melakukan tindakan bersama merupakan hal krusial dan merupakan tantangan utama kolaborasi karena selalu terdapat perbedaan karakteristik dan kekuatan antar aktor. Kejelasan prosedur dan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk legal-formal, pengaruh kepemimpinan, manajemen pengetahuan, serta manajemen sumber daya merupakan elemen-elemen yang mempengaruhi baik tidaknya kapasitas dari para aktor, sehingga menjadi mampu melakukan tindakan bersama. Namun, melihat penjelasan pada

masingmasing elemen, terdapat pengaruh yang muncul dari komponen sebelumnya, yaitu penggerakan prinsip bersama, dan motivasi bersama.

Kesimpulan akhir dari dinamika kolaborasi ini adalah baik tidaknya dinamika ditentukan oleh tiga komponen, yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama yang di dalamnya terdapat berbagai elemen. Dinamika yang ada berbentuk siklus, dimana masing-masing komponen saling mempengaruhi begitu pula dengan elemen- elemennya dan tidak dipungkiri bahwa elemen tersebut dapat mempengaruhi elemen lintas komponen.

2.1.2. Tindakan-Tindakan dalam Kolaborasi (*Actions*)

Tindakan kolaborasi di latarbelakangi oleh pemikiran mengenai sulit tercapainya tujuan jika hanya satu kelompok atau organisasi yang bertindak sendiri. Tindakan-tindakan dalam kolaborasi merupakan inti dari kerangka Collaborative Governance. Menurut Innes dan Booher dalam Emerson, tindakan- tindakan kolaborasi merupakan hasil utama dari proses kolaborasi linier yang terkadang dikaitkan dengan dampak. Hal ini dikarenakan pada dasarnya proses dan hasil tidak dapat dipisahkan dari dampak itu sendiri.

Tindakan kolaborasi yang efektif harus diungkapkan secara tersirat dengan perumusan tujuan yang jelas Hal ini dikarenakan akan sulit melakukan tindakan kolaborasi jika tujuan yang ingin dicapai dari kolaborasi

itu sendiri tidak dibuat secara eksplisit. Tindakan-tindakan kolaborasi pada prakteknya sangat beragam seperti pemberdayaan masyarakat, penetapan proses perijinan, pengumpulan sumber daya, monitoring sistem/ praktik manajemen baru, dan lain sebagainya. Kemudian, hasil daripada tindakan ini secara langsung membawa dampak sementara yang mengarah kembali pada dinamika kolaborasi, dan dampak jangka panjang. Menurut Huxam dalam Emerson, beberapa tindakan kolaborasi memiliki tujuan sangat luas seperti penentuan langkah strategis dalam isu/bidang kebijakan kesehatan. Namun banyak pula tindakan kolaborasi yang memiliki tujuan sempit seperti proyek pengumpulan dan analisis informasi spesifik. Tindakan kolaboratif ada yang dapat dilakukan secara sekaligus oleh seluruh *stakeholder* ada pula yang hanya bisa dilakukan oleh *stakeholder* tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing *stakeholder*.¹²

2.1.3. Dampak dan adaptasi hasil tindakan pada dinamika kolaborasi (*impacts and adaptation for collaboration dynamics*)

Dampak dalam CGR yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan, serta tidak diduga. Dampak yang diharapkan adalah “small-wins” yaitu hasil-hasil positif yang terus memberlangsungkan semangat para actor. Sedangkan dampak yang tidak

¹²Ibid hlm 23

diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Dampak tidak terduga juga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi.

Berbagai dampak tersebut menghasilkan umpan balik atau *feedbacks* yang kemudian diadaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana kolaborasi menyikapi *feedback* dari masing-masing aktor yang ada. Adaptasi yang baik adalah yang sekiranya dapat dilakukan oleh seluruh aktor kolaborasi, artinya tidak ada pengaruh kepentingan organisasi di atas kolaborasi, sehingga menyebabkan terjadinya usaha mengambil manfaat kolaborasi secara lebih untuk kepentingan organisasi sendiri. Adaptasi harus berdasarkan apa yang menjadi kolaborasi dan hal ini dipengaruhi keterbukaan kolaborasi itu sendiri.

2.2. Konsep Pariwisata

Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada Bab I pasal I mendefinisikan wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Sementara itu definisi pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selanjutnya definisi Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin, yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Selaras dengan itu Muljadi¹³ mengemukakan bahwa pariwisata merupakan aktivitas, pelayanan dan produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pariwisata merupakan suatu aktivitas perjalananyang dilakukan seseorang atau sekelompok orang mengunjungi destinasi wisata dengan tujuan rekreasi dan wisata minat khusus seperti olahraga serta untuk mempelajari hal yang unik yang bersifat menyenangkan dengan didukung berbagai fasilitas-fasilitas yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata dapat disebut wisatawan. Kegiatan pariwisata terjadi karena adanya wisatawan. Menurut Undang-undang No.9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Selanjutnya Sunaryo mengemukakan bahwa wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan

¹³Muljadi. *Kepariwisataan Dan Perjalanan*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. 2009. Hlm.7

wisata, seperti untuk berekreasi (*pleasure*), berbisnis (*business*) maupun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus yang lain (*special interest*)¹⁴

Sementara itu Pitana¹⁵ mengemukakan bahwa:

“orang yang melakukan perjalanan wisata disebut wisatawan atau *tourist*. Adapun Batasan terhadap wisatawan juga sangat bervariasi, mulai dari yang umum sampai dengan yang spesifik”.

United Nation Conference on Travel and Tourism di Roma (1963)

dalam Pitana¹⁶ memberikan batasan yang lebih umum, tetapi dengan menggunakan istilah '*visitor*' (pengunjung) yaitu :

“setiap orang yang mengunjungi negara yang bukan merupakan tempat tinggalnya, untuk berbagai tujuan, tetapi bukan untuk mencari pekerjaan atau penghidupan dari negara yang dikunjungi”.

Sebenarnya batasan ini hanya berlaku pada wisatawan internasional, tetapi secara analogis batasan ini berlaku untuk wisatawan domestik dengan atas daerah (provinsi).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa wisatawan adalah orang yang berkunjung ke destinasi tujuan wisata (DTW) dengan tujuan untuk rekreasi, relaksasi diri, menambah pengetahuan terkait budaya daerah yang dikunjungi dengan waktu tertentu yang bersifat sementara atau tidak menetap. Dalam hal ini wisatawan terdiri dari

¹⁴Bambang Sunaryo. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: GAVA MEDIA. 2013. Hlm 3

¹⁵Pitana I.G dan Gayatri. *Sosiologi Pariwisata Yogyakarta*. C.V Andi. 2005.Hlm 43

¹⁶Ibid hlm. 43

beberapa elemen dalam beberapa batasan yaitu perjalanan dari tempat asal, tujuan perjalanan, jarak, dan durasi waktu yang dipergunakan dalam melakukan perjalanan. Untuk mengunjungi sebuah destinasi tujuan wisata tentu saja memerlukan dana, maka dari itu wisatawan yang melakukan perjalanan wisata melakukan secara suka rela dan tidak bertujuan untuk mencari pekerjaan ataupun tinggal menetap pada suatu negara

Gray dalam Pitana mengklasifikasikan wisatawan menjadi dua, yaitu (1) *suntust* dan (2) *wanederlust*. *Sunlust tourist* adalah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah dengan tujuan utama untuk beristirahat atau relaksasi, sehingga mereka mengunjungi DTW yang mempunyai *sun, sea, sand*. Wisatawan tipe ini mengharapkan keadaan iklim, fasilitas, makan dan lain-lain, yang sesuai dengan daerah asalnya. Sebaliknya *wanderlust tourist* adalah wisatawan yang perjalanan wisatanya didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengalaman baru, ataupun mengangumi keindahan alam yang belum pernah dilihat. Wisatawan seperti ini tertarik kepada DTW yang mampu menawarkan keunikan budaya atau pemandangan alam yang mempunyai nilai pembelajaran yang tinggi.¹⁷ Wisatawan merupakan bagian dari insan pariwisata yang turut andil dalam menggerakkan roda perekonomian dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

¹⁷Pitana I.G dan Diarta I.K.S. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta . C.V ANDI. Hlm 49

Dalam sistem pariwisata, Pitana mengemukakan ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum, insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu: (1) masyarakat, (2) swasta, dan (3) pemerintah. Yang termasuk masyarakat adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik sah dari berbagai sumberdaya yang merupakan modal pariwisata, seperti kebudayaan. Dimasukkan ke dalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media massa. Selanjutnya dalam kelompok swasta asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, sedangkan kelompok pemerintah adalah pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, negara bagian, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya¹⁸.

Berdasarkan penjelasan di atas ada tiga aktor yang dapat menggerakkan roda pariwisata yaitu masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antar aktor tersebut. Sesuai yang dikemukakan oleh Sunaryo bahwa kemitraan pemerintah swasta dalam pembangunan pariwisata merupakan salah satu cara yang sangat strategis dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik, yang dalam hal ini pihak pemerintah tetap bertanggung jawab dan harus akuntabel bagi

¹⁸Pitana I.G dan Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata Yogyakarta*. C.V Andi. Hlm 96

penyediaan jasa publik dan menjaga kepentingan publik.¹⁹ Dalam hal ini pemerintah daerah melibatkan masyarakat sebagai pemilik sah dari berbagai sumberdaya yang merupakan modal pariwisata, seperti kebudayaan.

Hakikat pariwisata Indonesia bertumpu pada keunikan dan kekhasan budaya, alam, serta hubungan antar manusia. Sedarmayanti mengatakan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan proses kegiatan yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah dan keterkaitannya satu dengan lainnya dalam mengembangkan pariwisata yang didasarkan dan memperhatikan nilai-nilai agama, pelestarian sumber daya alam dan budaya, kepentingan politik, ekonomi, sosial serta pertahanan keamanan. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan Indonesia tetap menempatkan kebhinekaan, sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁰. Hal ini merupakan keunggulan komparatif pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan aset penting dalam pengembangan pariwisata, di mana pariwisata sebagai alat pelestari

¹⁹Bambang Sunaryo. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata. Yogyakarta: CV GAVA MEDIA.2013.hlm 88

²⁰Sedarmayanti, *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata* (Bandung: PT Refika Aditama,2014),hlm 15-18

kebudayaan, dapat berperan aktif melestarikan dan memperkenalkan hasil budaya Indonesia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam program pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas kegiatan pariwisata sebagai wahana promosi seni, budaya tradisional, dan alam secara global.
2. Terwujudnya kegiatan pariwisata yang mendukung pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap seni dan budaya masyarakat lain.
3. Terwujudnya kegiatan pariwisata sebagai wahana pendukung upaya berkreasi di bidang kesenian dan wahana yang mendukung pengembangan serta pengkayaan budaya baru sesuai tantangan masa depan.
4. Meningkatnya sumbangan pariwisata dalam mendorong peningkatan devisa dan kesejahteraan masyarakat lokal.
5. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan usaha kecil menengah dalam pengembangan pariwisata.
6. Meningkatnya kualitas manajerial pengembangan produk pariwisata dan keterpaduannya dengan upaya pemasaran pariwisata.

2.2.1. Pariwisata Budaya

Pitana mengemukakan bahwa budaya sangat penting perannya dalam pariwisata. Salah satu hal yang menyebabkan orang ingin melakukan perjalanan wisata adalah adanya keinginan untuk melihat cara hidup dan budaya orang lain dibelahan dunia lain serta keinginan untuk mempelajari budaya orang lain tersebut. Industri pariwisata mengakui peran budaya sebagai faktor penarik dengan mempromosikan karakteristik budaya dari destinasi. Sumber daya budaya dimungkinkan untuk menjadi faktor utama yang menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisatanya.²¹

Pariwisata budaya dapat dilihat sebagai peluang bagi wisatawan untuk mengalami, memahami, dan menghargai karakter dari destinasi, kekayaan dan keragaman budayanya. Pariwisata budaya memberikan kesempatan kontak pribadi secara langsung dengan masyarakat lokal dan kepada individu yang memiliki pengetahuan khusus tentang sesuatu objek budaya. Tujuannya adalah memahami makna suatu budaya dibandingkan dengan sekedar mendeskripsikan atau melihat daftar fakta yang ada mengenai suatu budaya.

Sumber daya budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata diantaranya adalah sebagai berikut.

²¹Pitana I.G dan Diantara I.K.S. *Pengantar Ilmu Pariwisata*(Yogyakarta: CV. ANDI) 2009.Hlm 74-75

1. Bangunan bersejarah, situs, monument, museum, galeri seni, situs budaya kuno.
2. Seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industri film dan penerbit.
3. Seni pertunjukan, drama, sendratari, lagu daerah, teater jalanan, eksibisi, festival, dan event khusus lainnya.
4. Peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs dan sejenisnya.

Menurut Sharpley dalam Pitana melihat bahwa:

“pariwisata merangsang munculnya komunikasi yang lebih intensif di dalam masyarakat lokal. Masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pariwisata, dan manfaat ekonomi pariwisata dapat digunakan dalam kegiatan pelestarian budaya, dan secara nyata pariwisata memberikan kontribusi di dalam pelestarian bangunan-bangunan bersejarah atau keagamaan”.²²

Pada sektor pariwisata penduduk asli dari destinasi tujuan wisata sangatlah penting di mana hal yang dititik beratkan pada masyarakat tersebut adalah kebudayaannya yang dapat menjadi daya tarik wisata, dari segi ekonomi pariwisata juga memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat. Budaya memiliki nilai tambah tersendiri bagi para wisatawan karena adanya rasa ingin tau untuk melihat cara hidup atau *cultur* sebuah

²²Pitana I.G dan Gayatri. *Sosiologi Pariwisata* (Yogyakarta : CV. ANDI) 2005. Hlm 123

daerah yang tentu saja berbeda dari daerah asal wisatawan. Selain budaya, hal yang menarik lainnya yang dapat dijadikan tujuan wisata yaitu alam.

2.2.2. Pariwisata Alam

Alam dapat dijadikan sebuah objek wisata, dimana pada dasarnya alam bersifat netral sampai campur tangan manusia yang menjadikan alam menjadi sebuah objek wisata. Menurut Fandeli dalam Widyasmi objek wisata alam adalah objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan sumber daya alam dan tata lingkungannya²³.

Menurut Fennel dalam Pitana²⁴ sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Lokasi geografis. Hal ini menyangkut karakteristik ruang yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa variable lain, misalnya untuk wilayah Eropa yang dingin dan bersalju seperti Swiss unguin cocok dikembangkan untuk atraksi wisata ski es.
2. Iklim dan cuaca. Ditentukan oleh *latitude* dan elevation diukur dari permukaan air laut, daratan, pegunungan, dan sebagainya. Bersama faktor geologis, iklim merupakan penentu utama dari lingkungan fisik yang mempengaruhi vegetasi, kehidupan binatang, angin, dan sebagainya.

²³Kartika Widyasmi. *Strategi Pengelolaan Pariwisata Bahari Di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak* (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) 2012. Hlm 17

²⁴Pitana I.G dan Diarta I.K.S. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta . C.V ANDI. Hlm 71

3. Topografi dan *landforms*. Bentuk umum dari permukaan bumi (topografi) dan struktur permukaan bumi yang membuat beberapa areal geografis menjadi bentang alam yang unik (*landform*). Kedua aspek ini menjadi daya tarik wisata tersendiri yang membedakan kondisi geografis suatu wilayah/benua dengan wilayah/benua lainnya sehingga sangat menarik untuk menjadi atraksi wisata.
4. *Surface materials*. Menyangkut sifat dan ragam material yang menyusun permukaan bumi, misalnya formasi bebatuan alam, pasir, mineral, minyak, dan sebagainya, yang sangat unik dan menarik sehingga bias dikembangkan menjadi atraksi wisata alam.
5. Air. Air memegang peran sangat penting dalam menentukan tipe dan *level* dari rekreasi *outdoor*, misalnya bias dikembangkan jenis wisata pantai/bahari, danau, sungai, dan sebagainya (*sailing, cruise, fishing, snorkelling*, dan sebagainya).
6. Vegetasi. Vegetasi merujuk pada keseluruhan kehidupan tumbuh yang menutupi suatu area tertentu. Kegiatan wisata sangat tergantung pada kehidupan dan formasi tumbuhan seperti misalnya ekowisata pada kawasan konservasi alam/hutan lindung.
7. Fauna. Beragam binatang berperan cukup signifikan terhadap aktifitas wisata seperti melihat cara binatang makan dan hidup.

Melihat dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa alam dapat dijadikan sebuah objek wisata tergantung pada apa yang dapat

memenuhi kebutuhan manusia berdasarkan elemen-elemen yang ada pada alam misalnya keindahan alam yang mencakup pantai, sungai, dan pegunungan, keberagaman flora dan faunan, vegetasi alam, tempat rekreasi air, objek mangalitik, ekosistem yang belum pernah terjamaah manusia, serta cuaca yang dapat menjadi daya tarik wisata.

2.3. Penelitian Terdahulu

Collaborative Governance merupakan instrumen yang tepat untuk berkonfrontasi dengan suatu masalah, sebab *collaborative governance* menciptakan rasa “kepemilikan bersama” terhadap masalah tersebut dan juga dengan *collaborative governance* setiap kebijakan yang diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama setiap *stakeholder* yang terlibat. *Collaborative Governance* merupakan suatu kondisi ketika pemerintah, swasta dan masyarakat berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Festival Pinisi merupakan sebuah *event* yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba dengan menampilkan kebudayaan sebagai atraksi wisata dan dalam proses penyelenggaraannya terdapat kolaborasi antar pemerintah Kabupaten Bulukumba, pihak swasta dan tokoh-tokoh adat. Adapun, penelitian tentang *Collaborative Governance* telah banyak dilakukan diberbagai tempat beberapa diantaranya, beberapa di antaranya sebagai berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	NAMA	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	PENGUMPULAN DATA	HASI PENELITIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meika Permata Sari	<i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan Objek Wisata Horti Park Lampung di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan objek wisata Horti Park Lampung dapat dikategorikan sebagai pra- <i>Collaborative Governance</i> dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan objek wisata edukasi.	Tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan pengembangan objek wisata Horti Park Lampung dikategorikan sebagai pra- <i>Collaborative Governance</i> mengacu pada model <i>Collaborative Governance</i> Ansel & Gash yaitu kondisi awal menggambarkan ketidakseimbangan sumber daya dan minimnya insentif; desain kelembagaan posisi teratas Pihak Pengelola Horti Park Lampung memiliki kedudukan yang sama dengan ITERA, anggota kolaborasi Kepala Kebun, PT. Primasid Andalan Utama, PT. Ewindo, dukungan masyarakat Horti Park Lampung; kepemimpinan menjalankan aturan berdasarkan SOP; proses kolaborasi tahap face to face masih dilakukan pihak terlibat, adanya kepercayaan pihak yang terlibat dan merasa yakin dengan keberadaan kolaborasi, dibutuhkan komitmen memperkuat kolaborasi dengan MOU, mengedepankan pemahaman bersama, hasil akhir kolaborasi terjalin sudah baik walaupun masih terdapat hambatan.
2.	Dimas Luqito Chusuma Arrozaa q	<i>Collaborative Governance</i> (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo)	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses <i>Collaborative Governance</i> terkait pengembangan Kawasan minapolitan di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No.520/1395/201.1/2012 tentang Penetapan Kabupaten Sidoarjo sebagai pusat kawasan minapolitan.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam pengembangan Kawasan Minapolitan sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan kolaborasi sudah melalui pengerakan prinsip bersama, motivasi bersama dan pembentukan kapasitas bersama. Setelah tiga hal itu terbentuk dilanjutkan dengan melaksanakan tindakan kolaborasi yang memberikan dampak sementara. Sedangkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kolaborasi antara lain : kesulitan dalam membentuk kelompok usaha menjadi berbadan hukum, kontinuitas kolaborasi yang masih kurang, pemerintah hanya memfasilitasi peningkatan produktivitas tanpa memberikan alternatif pemasaran, dan pihak swasta kurang diikutsertakan dalam seluruh kegiatan kolaborasi

1	2	3	4	5	6
3.	Anwar Fuad Alamsyah Lubis	Collaborative Governance Dalam Program Cerdas (Percepatan Rehabilitasi dan Apresiasi Terhadap Sekolah) di Kabupaten Deli Serdang	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kolaborasi ketiga sektor dalam meningkatkan mutu Pendidikan melalui program CERDAS Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini juga memberikan beberapa saran dan rekomendasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya kepada Dinas Pendidikan, GMPP, dan APPP agar tercapai tujuan program cerdas.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan 8 variabel ataupun factor-faktor yang menjadi ukuran dalam keberhasilan <i>Collaborative Governance</i> yang dikembangkan oleh DeSeve, yaitu <i>Networked structure type, commitment to a common purpose, trust among the participants, kepastian dalam Governance, Access to authority, Distributive responsibility, information sharing dan access to resources</i>	Dari hasil analisis data diperoleh beberapa kesimpulan penting dalam penelitian ini. Bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dalam program CERDAS, seperti tidak adanya tokoh penggerak dalam program CERDAS, tidak adanya wadah GMPP di desa/kelurahan. Perlu adanya memperbaiki komunikasi dalam program CERDAS antara pihak yang bermitra. Serta mensosialisasikan kembali mekanisme CERDAS sampai pada stakeholder di desa/kelurahan. Tingkat pendidikan ekonomi masyarakat yang masih rendah juga mempengaruhi kelangsungan program CERDAS.

Sumber : Hasil olahan data sekunder tahun 2020

Penelitian terdahulu pada tabel 1 (satu) dapat di tarik kesimpulan bahwa letak persamaan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian saat ini adalah kesamaan dalam mengkaji *Collaborative Governance* pada

suatu program dan pengembangan kegiatan dan ketiga penelitian tersebut menggunakan tipe penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan ketiga penelitian sebelumnya adalah penelitian ini tidak hanya membahas tentang proses kolaborasi saja namun juga membahas tentang dampak sementara, dampak yang tidak diinginkan, dan dampak tidak terduga pada tindakan kolaborasi.

2.4. Kerangka Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian ini. Festival Pinisi merupakan sebuah *event* yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Pariwisata yang didasari adanya peraturan pemerintah, peraturan bupati, dan keputusan bupati, event tersebut menampilkan atraksi wisata budaya Kabupaten Bulukumba. Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba mengemas wisata budaya dan wisata alam dalam satu rangkaian

Penyelenggaraan Festival Pinisi terdapat terdapat tiga *stakeholder* yakni Pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. *Stakeholder* tersebut merupakan aktor utama yang melahirkan ide, ilmu pengetahuan, kreatifitas, dan teknologi terhadap terselenggaranya Festival Pinisi. Hubungan yang

baik dan saling menunjang antara ketiga *stakeholder* tersebut dalam kaitannya dengan proses dan pilar-pilar penyelenggaraan Festival Pinisi.

Proses *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Festival Pinisi terdapat tiga point penting yaitu Dinamika kolaborasi, Tindakan Tindakan dalam kolaborasi serta dampak dan adaptasi hasil tindakan dinamika kolaborasi.

Dari hasil penelitian telah mengungkapkan tiga *stakeholder* utama dalam penyelenggaraan Festival Pinisi :

1. Pemerintah Daerah: Inisiator penyelenggaraan Festival Pinisi, pembuat regulasi dan legitimasi, promosi pariwisata.
2. Swasta : Memberi bantuan dana, mengibahkan kapal pinisi, memberikan potongan harga hotel
3. Masyarakat : Tokoh adat sebagai pemilik dan pelaku utama dari kebudayaan Kabupaten Bulukumba.

**KERANGKA PIKIR PENELITIAN
ANALISIS *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PENYELENGGARAAN FESTIVAL PINISI 2019
DI KABUPATEN BULUKUMBA**

Gambar 1. Kerangka Pikir

